

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L A K I P)
TAHUN ANGGARAN 2003**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2004**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan telah berlakunya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur Penunjang Daerah yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2003 melaporkan capaian kinerja (performance result) tahun 2003 yang mengacu pada Rencana Strategis Bappeda Tahun 2002-2006 dan Rencana Strategis Kabupaten Lamongan Tahun 2001-2005. berisi tentang profil Badan yang meliputi kedudukan, tugas pokok dan fungsi dan susunan organisasi.

Untuk melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian kinerja sasaran tersebut telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 7.165.509.931,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Era otonomi Daerah membawa implikasi yang luas pada berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Penataan kelembagaan menuju terciptanya suatu tatanan baru di berbagai tingkatan sangat mewarnai dalam mewujudkan tujuan organisasi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2000 dan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Peraturan-peraturan yang sebelumnya telah mengalami perubahan dan pengembangan baik dari sisi struktur organisasi maupun penataan kelembagaannya. Sebagai Badan yang mempunyai tugas menyusun perencanaan pembangunan di Daerah, memiliki kedudukan yang strategis dalam menentukan perkembangan suatu Daerah kedepan. Perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2002-2006 adalah alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tahun ke II (2003) perlu dilakukan adanya evaluasi sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor 203/PM.PAN/2002 perihal Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja, yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah diperbaiki dengan Keputusan Kepala Badan Administrasi Negara

Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2000 dan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2001, bahwa kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

C. TUGAS POKOK

Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.

D. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah
2. Pelayanan penunjang bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pembangunan Daerah
3. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, dan Pola Umum Pelita Daerah
4. Penyusunan REPETADA Kabupaten
5. Penyusunan program tahunan sebagai pelaksanaan pola dasar Pembangunan Daerah, Pola umum PELITA Kabupaten dan Penyusunan REPETADA Kabupaten, yang dibiayai oleh daerah itu sendiri atau yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi yang dimasukkan ke dalam Program Daerah Propinsi

- dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan Nasional
6. Pengkoordinasian Perencanaan diantara dinas-dinas, Satua Organisasi lain dalam Lingkungan Pemerintah Daerah.
 7. Penyusunan RAPBD Kabupaten bersama-sama dengan Instansi terkait dengan koordinasi Sekretaris Daerah.
 8. Pelaksanaan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan Pembangunan di daerah.
 9. Penyiapan dan pengembangan pelaksana rencana Pembangunan di daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut.
 - 10 Pemantauan Pelaksanaan pembangunan di daerah.
 - 11 Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga BAPPEDA.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2003 dengan struktur organisasi sebagaimana terlampir didukung oleh sejumlah Personil sebagai berikut :

No	J a b a t a n	Kondisi (Orang)	Formasi (Orang)
1.	Kepala	1	1
2.	Sekretaris	1	1
3.	Kepala Bidang	4	4
4	Kepala Sub Bagian	3	3
5.	Kepala Sub Bidang	14	15
6.	Staf	30	30
7.	Sopir	1	2
J u m l a h		54	56

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. VISI, MISI DAN FAKTOR FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Visi BAPPEDA Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana Instansi BAPPEDA Kabupaten Lamongan dimasa mendatang dan Visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan dan hambatan yang ada.

Sehubungan dengan analisis dan pendalaman tersebut maka ditetapkan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

**“Menjadikan BAPPEDA sebagai Perencana
Pembangunan yang Profesional untuk Kesejahteraan
Masyarakat”.**

Dari Visi dimaksud dikandung harapan dapat mewujudkan masyarakat Lamongan yang sejahtera melalui berbagai pentahapan proses perencanaan pembangunan dari bawah yang didukung oleh semua unsur (Stake Holder) dan dianalisis secara akurat, tepat dan efisien.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Dari gambaran tersebut maka ditetapkan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan sumberdaya BAPPEDA dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berkualitas.

2. Meningkatkan validitas dan akurasi data dalam rangka penelitian dan penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, fisik prasarana dan sosial budaya guna mendorong perkembangan dan kemajuan masyarakat.
3. Memantapkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan serta menjadi motor penggerak dalam menetapkan strategi, konsep-konsep kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Keberhasilan sebuah visi organisasi sangat ditentukan oleh beberapa faktor penentu yang merupakan kunci keberhasilan organisasi. Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan tersedianya SDM, sarana dan prasarana BAPPEDA yang cukup untuk meningkatkan manfaat potensi SDA, jumlah penduduk, IPTEK, terbukanya dukungan dana dan peluang kerjasama dengan berbagai Pihak ;
2. Mengoptimalkan terbatasnya data pendukung perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi belum adanya kesamaan persepsi dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta makin ketatnya persaingan antar Daerah ;
3. Meningkatkan profesionalisme tenaga perencana dan ketersediaan dana operasional melalui berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999, tersedianya potensi SDA, jumlah penduduk dan IPTEK serta terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai Pihak.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan :

- a. Mewujudkan pelaksanaan Perda Nomor 07 Tahun 2000 dan Tupoksi BAPPEDA untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 serta tingginya tuntutan masyarakat akan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

- b. Mewujudkan ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan yang valid dan akurat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan mengantisipasi ketatnya persaingan antar daerah.
 - c. Mewujudkan produk dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan terpadu.
2. Sasaran :
- a. Meningkatnya Kinerja SDM
 - b. Terwujudnya data dan perencanaan detail pembangunan daerah
 - c. Meningkatnya koordinasi, monitoring dan pembinaan

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

1. Kebijakan :
- a. Mengoptimalkan pelaksanaan TUPOKSI BAPPEDA melalui peningkatan perencanaan pembangunan daerah dan fungsi administrasi BAPPEDA ;
 - b. Mengoptimalkan kinerja SDM; sarana dan prasarana serta dukungan dana
 - c. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan mewujudkan ketersediaan data yang valid dan akurat serta penggalan, pengembangan dan evaluasi perencanaan ;
2. Program :
- a. Penataan ruang dan Wilayah ;
 - b. Penelitian pendukung Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - c. Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah ;
 - e. Peningkatan efisiensi dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah ;
 - f. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah ;
 - g. Penyempurnaan Pengembangan Statistik ;

- h. Inventarisasi dan Evaluasi Sumberdaya ;
- i. Pengembangan Sistem Informasi ;
- j. Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama ;

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2003

Di dalam Dokumen Rencana Strategis EAPPEDA Tahun 2002-2006 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan target kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun 2003, adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Mewujudkan pelaksanaan Perda Nomor 07 Tahun 2000 dan Tupoksi BAPPEDA untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 serta tingginya tuntutan masyarakat akan kualitas perencanaan pembangunan daerah:

SASARAN

Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)
1. Meningkatnya Kinerja SDM	1 Jumlah yang dilatih : 1 Sosialisasi Renstra	624 org

Tujuan 2 : Mewujudkan ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan yang valid dan akurat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan mengantisipasi ketatnya persaingan antar daerah

SASARAN

Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)
2. Terwujudnya data dan perencanaan pembangunan daerah detail	1. Tersusunnya / tersedianya dokumen/data - data yang digunakan bagi perencanaan pembangunan :	

Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)
	1 RUTRK/RDTRK	3 kec
	2 Masterplan Pengelolaan SDA dan Jaringan Irigasi	1 unit
	3 Masterplan Pengembangan komoditi pertanian	1 unit
	4 Pemetaan wilayah pesisir dan laut	2 kec
	5 SIM Jalan	1 unit
	3 Pembangunan Kota Mandiri	1 unit
	7 AKU dan Strategi Prioritas APBD	2 unit
	8 Perencanaan umum, survey, studi kelayakan dan evaluasi pengendalian	3 kegiatan
	9 Lamongan Dalam Angka dan IPM	2 unit
	10 PDRB	100 eks
	11 Pengadaan Peta Dasar	100 lembar
	12 Lamongan Menyingsing Fajar Serie II	100 keping
	13 Penelitian Pondok Pesantren dlm pemberdayaan masyarakat	10 buku

Tujuan 3 : Mewujudkan produk dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan terpadu

SASARAN

Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)
3. Meningkatnya koordinasi, monitoring dan pembinaan	1 Terlaksananya koordinasi, monitoring dan pembinaan : 1 Proyek PPK 3 Proyek P2MPD 4 Integrasi GerduTaskin 5 UNICEF 6 PKPS-BBM 7 P2TPD 8 TMMD	1 paket 68 desa 33 desa 4 kegiatan 1 unit 4 bidang 2 desa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

1.1. Mengoptimalkan kinerja SDM, sarana dan prasarana, serta dukungan dana, meliputi program :

1.1.1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah.

1.1.2. Peningkatan efisiensi dan pendayagunaan aparatur pemerintah, meliputi kegiatan :

1.1.2.2. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati

LPJ Bupati dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya anggaran (APBD) Kabupaten Lamongan, untuk persiapan awal pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai bulan Desember pada setiap tahunnya, Produk yang dihasilkan berupa :

- Buku Sambutan LPJ Bupati Tahun 2002
- Buku Hasil-Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2002

1.1.2. Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah, meliputi kegiatan :

1.1.2.1. Sosialisasi dan Penggandaan Renstra

2.1. Mengoptimalkan Pelaksanaan Tupoksi BAPPEDA melalui peningkatan perencanaan pembangun daerah dan fungsi administrasi BAPPEDA, meliputi program :

2.1.1. Penataan Ruang dan Wilayah, meliputi kegiatan :

2.1.1.1. Penyusunan RUTRK dengan kedalaman RDTRK IKK Solokuro dan Sukorame serta Revisi RUTRK/RDTRK IKK Babat

Penyusunan RUTRK/RDTRK ini dikandung maksud agar Pemerintah Kabupaten Lamongan mempunyai rencana pemanfaatan ruang kota Solokuro, Sukorame serta Babat jangka panjang yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan dan aspirasi pemerintah dan masyarakat dalam upaya menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan antar wilayah kota atau dalam satu bagian wilayah kota.

Masukan dari kegiatan ini adalah dibiayai dengan dana DAU sebesar Rp. 150.000.000,00 yang bekerjasama dengan 3 (tiga) konsultan perencanaan tata ruang. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Solokuro, Sukorame dan Babat yang meliputi : Laporan Pendahuluan, Kompilasi Data, Buku Analisa, Buku Rencana dan Album Peta. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen rencana umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RUTRK/RDTRK), dengan indikator kinerja pada 3 (tiga) Ibukota kecamatan yaitu Solokuro, Sukorame dan Babat dan telah terselesaikan semuanya.. Manfaat kegiatan ini adalah sebagai pengendalian pembangunan di wilayah IKK Solokuro, Sukorame dan Babat, dengan target indikator 50 % dan telah tercapai semuanya. Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya ketertiban pelaksanaan pembangunan di IKK Solokuro, Sukorame dan Babat, dengan target pencapaian indikator 20 % dipengaruhi oleh kegiatan ini, dan dari hasil lapangan didapati telah dipenuhinya target tersebut.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyusunan dokumen RUTRK/RDTRK ini, untuk mengantisipasi terhadap permasalahan tersebut, diperlukan adanya sosialisasi yang melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana penataan ruang serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya penataan ruang sebagai alat untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Lamongan.

2.1.1.2. Penyusunan Masterplan Pengelolaan sumberdaya air di Kabupaten Lamongan

Maksud dari kegiatan penyusunan Master Plan Manajemen Pengelolaan Sumberdaya Air khususnya yang terkait dengan pengendalian banjir di Kabupaten Lamongan adalah suatu upaya untuk menata dan mengembangkan sistem/pola manajemen dalam pengelolaan sumber-sumber air (waduk/embung, rawa, sungai) yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan secara terintegrasi agar didapat hasil yang optimal dengan dilengkapi informasi mengenai jumlah air yang masuk ke wilayah Kabupaten Lamongan dan kemampuan dari pada wilayah Kabupaten Lamongan untuk menangkapnya dan menyimpannya selama jangka waktu tertentu, dilengkapi dengan gambar/peta dan perhitungan-perhitungan hidrolika

2.1.1.3. Penyusunan Masterplan pengembangan komoditi pertanian

Penyusunan Masterplan pengembangan komoditi pertanian di Kabupaten Lamongan dimaksudkan sebagai

pedoman penyusunan kebijakan dalam meningkatkan produksi pertanian melalui pemanfaatan lahan produktif maupun marginal.

Masukan dari kegiatan ini adalah dibiayai dari DAU sebesar Rp. 190.000.000,00 dilaksanakan selama 6 bulan yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Masterplan pengembangan komoditi pertanian yang meliputi: Laporan pendahuluan, Laporan kemajuan, draft laporan akhir, Laporan Akhir, Executif Summary dan Album Peta, sedangkan Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen masterplan untuk mengembangkan komoditi pertanian di Kabupaten Lamongan sebanyak 50 eksemplar, Sedangkan manfaat yang dapat dirasakan dari kegiatan ini adalah peningkatan informasi untuk pengembangan di bidang pertanian, dengan target kinerja sebesar 30 % untuk pengembangan komoditi pertanian disediakan dari kegiatan ini, dan tercapai seluruhnya. Adapun dampak dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengembangan komoditi pertanian dengan target kinerja sebesar 10 % dipengaruhi oleh adanya kegiatan ini. Dan menurut hasil survey telah tercapai seluruhnya.

Dari hasil sosialisasi kepada dinas/instansi dan kelompok tani yang berkompeten terhadap masterplan pengembangan komoditi pertanian ini menunjukkan adanya apresiasi yang tinggi terhadap masterplan ini.

Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terbatasnya data-data sekunder yang tersedia di instansi terkait untuk mendukung kegiatan ini,

adapun untuk mengantisipasi dari permasalahan tersebut adalah dengan melakukan rapat-rapat koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung yang tersedia walaupun kurang memadai.

2.1.1.4. Pemetaan wilayah pesisir dan laut untuk pengembangan perikanan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam potensi wilayah pesisir yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan agar dapat diinformasikan dan dijual potensinya kepada dunia usaha dan masyarakat, juga digunakan untuk lebih memacu pertumbuhan dan perkembangan wilayah pesisir dan laut Kabupaten Lamongan.

Masukan dari kegiatan ini dibiayai sebesar Rp. 75.000.000,00 dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang. Sedangkan Keluaran dari kegiatan ini berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir, Executive Summary dan Album Peta. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen dan peta perencanaan pengelolaan wilayah pesisir, adapun target kinerjanya adalah 1 paket dan 50 eksemplar dan sudah dipenuhi seluruhnya. Manfaat yang dapat dirasakan dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan informasi untuk pengembangan potensi wilayah pesisir dan laut dengan target kinerja sebesar 20 % disediakan oleh adanya kegiatan ini. Sedangkan dampak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya pengembangan potensi dan jenis usaha di wilayah yang berbasis sumberdaya perikanan

dengan target sebesar 10 % disebabkan adanya kegiatan ini

Permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan ini adalah belum tercakupnya secara detail tentang Peraturan-peraturan/Undang-undang yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan ini adalah meningkatkan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait keterbatasan data sekunder, sosialisasi terhadap stakeholder terkait dengan maksud dan tujuan kegiatan ini..

2.1.2. Penelitian Pendukung Perencanaan Pembangunan, meliputi kegiatan :

2.1.2.1. Penelitian Peran Pondok Pesantren dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lamongan

Pondok Pesantren merupakan sebuah Lembaga yang diakui memiliki potensi yang besar dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, karena Pondok Pesantren mampu menciptakan sebuah sistem tersendiri dan memiliki budaya yang unik dalam kesehariaanya sebagai Sub culture, kemudian mampu mempengaruhi budaya masyarakat sekitarnya. Para pimpinan Pondok bukanlah sekedar perantara budaya, akan tetapi menjadi pencipta kebudayaan yang telah mewarnai bentuk kebudayaan Indonesia .Pondok Pesantren telah mengalami perubahan paradigma dengan memegang teguh kaiadah yang cukup kuat yaitu (melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik)

Masukan dalam kegiatan ini dibiayai dari APBD sebesar Rp. 50.000.000,00 yang bekerjasama dengan LSM Dian Pertiwi Lamongan, Keluaran dari kegiatan ini berupa Draft Laporan Penelitian dan Laporan Akhir Penelitian masing-masing sebanyak 10 eksemplar. Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya dokumen penelitian terhadap peran pondok pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, Manfaat dari kegiatan ini adalah Mengoptimalkan peran pondok pesantren dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan dampak dari kegiatan ini meningkatkan peran pondok pesantren.

2.1.3. Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan :

2.1.3.1. Sharing Biaya konsultan pembangunan kota mandiri

Kegiatan sharing dana konsultan ini dimaksudkan sebagai dukungan terhadap penyusunan masterplan kawasan industri Pantura Paciran dan Kota Mandiri dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan industri Pantura dapat terarah dan tertata sesuai rencana yang tertuang dalam masterplan dan pada tahapan akhir akan tercipta suatu kota mandiri.

Untuk mewujudkan rencana dimaksud Pemerintah Kabupaten Lamongan menggandeng PT. "SIER" dan bekerjasama dengan PT. "LAMICITRA Nusantara" Surabaya. Namun karena adanya defisit ekonomi yang terjadi pada PT. SIER, maka rencana penyusunan Master Plan dimaksud sampai dengan akhir tahun anggaran 2003 belum dapat dilaksanakan.

2.1.3.2. Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan pritoritas APBD

Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi daerah. Tingkat pencapaian atau kinerja pelayanan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran pada dasarnya merupakan tahapan dan perkembangan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah : Laporan Final AKU APBD 2004 dan Strategi dan Prioritas APBD 2004.

2.1.3.3. Perencanaan umum, survey, study kelayakan usulan dan evaluasi pengendalian

Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan rutin BAPPEDA sesuai dengan tugas dan fungsinya, dimana dalam mengawali pelaksanaan kegiatan perencanaan selalu diawali dengan kegiatan UDKP di kecamatan untuk membahas usulan dari desa yang sebelumnya telah dibahas melalui Musbangdes. Dari hasil tersebut dilakukan pembahasan secara intensif di tingkat kabupaten berupa Rakorbang Kabupaten, untuk melakukan sinkronisasi usulan dari bawah dengan usulan dinas sektoral sesuai dengan usulan dan pedoman renstra daerah 2002 – 2006. Terhadap dana-dana dari proyek-proyek yang tidak dapat didanai dari APBD Kabupaten diajukan pada Pemerintah Propinsi dan Pusat melalui forum Rakorbang Propinsi dan Rakornas di Jakarta. Terhadap hasil sinkronisasi tersebut sebelum diajukan ke DPRD untuk memperoleh persetujuan berupa proyek pembangunan yang tercantum dalam APBD Kabupaten,

sebelumnya dilakukan beberapa tahapan pengkajian dengan Tim Satuan 3 Anggaran yang sebelumnya telah dilakukan survey lapangan untuk melihat layak tidaknya proyek tersebut. Disamping fungsi sebagai perencana BAPPEDA, juga diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap hasil-hasil pembangunan yang dilakukan. Untuk itu kegiatan yang dilakukan berupa monitoring dan evaluasi sebagai bahan rekomendasi terhadap perencanaan pada tahun berikutnya.

3.1. Mengoptimalkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan mewujudkan ketersediaan data yang valid dan akurat serta penggalan, pengembangan dan evaluasi perencanaan, meliputi program :

3.1.1. Penyempurnaan dan pengembangan statistik, meliputi kegiatan :

3.1.1.1. Penyusunan Lamongan Dalam Angka dan Indeks Pembangunan Manusia

Kegiatan Penyusunan LDA dan IPM dimaksudkan untuk menyediakan sarana informasi yang mudah dan menarik serta cepat dan akurat serta merupakan salah satu tolok ukur untuk mengikuti perkembangan manusia kepada hidup sehat dan memilih hidup layak.

Masukan kegiatan ini dibiayai dari APBD sebesar Rp. 70.000.000,- bekerjasama dengan Kantor Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. Sedangkan keluaran dari kegiatan ini adalah berupa dokumen Lamongan Dalam Angka (LDA) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data Lamongan Dalam Angka dan Indeks Pembangunan

Manusia per kecamatan, dengan target kinerja sebanyak 262 buku dan sudah terpenuhi sepenuhnya. Manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai bahan pengambilan kebijakan berdasarkan data perencanaan dengan target kinerja sebesar 80 % diambil dari LDA dan IPM. Dampak yang diharapkan terjadi pada kegiatan ini adalah tingkat akurasi data mencapai 90 %.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah lemahnya sistim koordinasi antar Dinas/Instansi terkait dan para petugas yang menangani masih belum terpadu serta pengumpulan data di lapangan mengalami hambatan karena petugas belum selalu mengikuti perubahan perkembangan data yang ada. Sedangkan untuk mengatasi masalah tersebut perlu diambil langkah-langkah antisipasi berupa : Diklat bagi petugas lapangan, Sosialisasi Perda dan peraturan-peraturan lain serta peningkatan sistim koordinasi dalam pengumpulan data

3.1.1.2. Penyusunan PDRB

Secara umum pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, peningkatan hubungan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, serta berimbang nya nilai kebutuhan jasmani dan rohani.

Data statistik juga merupakan indikator yang sangat bermanfaat untuk memonitor proses pembangunan yang sedang berjalan maupun sebagai alat

evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengetahui apakah sasaran pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan dapat dipenuhi sesuai dengan kehendak dan cita-cita masyarakat, tentunya dibutuhkan alat ukur yang relevan yang bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Selama ini salah satu alat ukur yang dianggap cukup relevan adalah Statistik Pendapatan Regional yang berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah keterbatasan data primer, skunder dan responden, sehingga hal ini berdampak pada hasil akhir. Adapun langkah antisipasi guna mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi antar dinas/instansi terkait.
2. Meningkatkan sosialisasi tentang arti penting dukungan data yang akurat.

3.1.1.3. Pengadaan Peta Dasar

Pengadaan Peta Dasar Administrasi Kabupaten Lamongan tahun 2003 dimaksudkan untuk menyediakan sarana yang dapat dipakai sebagai titik tolak dalam perencanaan pembangunan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan lokasi kegiatan pembangunan baik sektoral maupun regional. Sedangkan tujuannya yang terpenting dalam pengadaan Peta Dasar Administrasi tersebut adalah untuk memudahkan dan meningkatkan koordinasi terutama dalam menetapkan lokasi

pembangunan dalam rangka memperpadukan kegiatan pembangunan di daerah.

Masukan pada kegiatan ini dibiayai dari APBD sebesar Rp. 15.000.000,00 dimana pada pelaksanaannya bekerjasama dengan Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan, Keluaran dari kegiatan ini adalah PDRB sebanyak 100 buku. Adapun hasil yang dapat dirasakan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen PDRB per kecamatan sebanyak 100 buku. Manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan perencanaan berdasarkan data perencanaan. Sedangkan dampak yang diinginkan dari kegiatan ini adalah perencanaan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi perekonomian lokal, regional dan nasional.

3.1.2. Inventarisasi dan evaluasi sumberdaya, meliputi kegiatan :

3.1.2.1. Validasi Data Desa/Kelurahan dan Keluarga miskin di Kabupaten Lamongan

Pada Tahun 2001 Pemerintah Propinsi Jawa Timur bersama Biro Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Telah melakukan kegiatan Pendataan Kemiskinan dengan Indikator baru (PKIB). Pendataan tersebut memberikan Informasi mengenai Rumah Tangga / Penduduk Miskin mencakup nama dan alamat yang dapat digunakan untuk melacak kembali keberadaan Rumah Tangga/Penduduk miskin tersebut. Mengingat Pendataan tersebut dilakukan pada tahun 2001 sehingga dimungkinkan adanya perubahan jumlah penduduk miskin, untuk itu perlu dilakukan pendataan ulang (Update) dengan menggunakan parameter PKIB.

Masukan dalam kegiatan ini dibiayai dari APBD sebesar Rp. 150.000.000,00 bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik Jawa Timur, sedangkan Keluaran kegiatan ini adalah pendataan ulang desa/kelurahan dan rumah tangga miskin di 27 kecamatan. Sedangkan hasil kegiatan ini adalah tersedianya data desa/kelurahan dan rumah tangga miskin sebanyak 10 buku dan CD. Manfaat dari hasil kegiatan ini digunakan sebagai pedoman perencanaan pengendalian kemiskinan dengan target kinerja sebesar 80 % diperoleh dari informasi ini. Sedangkan dampak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tepatnya sasaran kegiatan pengentasan kemiskinan dengan target kinerja 80 % dipengaruhi oleh adanya kegiatan ini.

3.2.Mewujudkan kemampuan daya saing daerah dengan peningkatan sumber informasi dan melakukan promosi daerah, meliputi program :

3.2.1. Pengembangan sistem informasi, meliputi kegiatan :

3.2.1.1. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Jalan

Maksud kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Jalan Kota/Kabupaten Lamongan adalah sebagai pedoman dan referensi dalam perencanaan, peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan jalan. Sedangkan tujuannya agar dalam perencanaan kegiatan peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan jalan Kota/Kabupaten Lamongan tepat sasaran serta sesuai skala prioritas mendesak

Masukan kegiatan ini adalah dibiayai dari APBD sebesar Rp. 75.000.000,00, sedangkan keluarannya berupa Laporan Pendahuluan, Dokumen SOP/Manual

HW, Software Aplikasi, Materi Pelatihan, Laporan Akhir dan VCD SIM Jalan. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai kondisi jalan kabupaten. Sedangkan Manfaat dari kegiatan ini adalah sebagai dokumen pendukung perencanaan pembangunan jalan poros desa dan jalan kabupaten. Dampak dari kegiatan ini diharapkan kesesuaian perencanaan pembangunan jalan dengan SIM Jalan mencapai 60 %.

3.2.1.2. Lamongan Menyingsing Fajar Serie II

Kegiatan penyusunan Lamongan Menyingsing Fajar Serie II bertujuan untuk pengenalan dan informasi potensi sumberdaya alam di wilayah Kabupaten Lamongan. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah mengenalkan potensi-potensi sumberdaya alam, memberikan informasi berupa data-data yang akurat tentang potensi daerah, memberikan informasi keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh bila melakukan investasi di Kabupaten Lamongan.

Masukan dari kegiatan ini dibiayai dari APBD sebesar Rp. 75.000.000,00 bekerjasama dengan LPM – ITS – Surabaya, Keluaran adalah berupa Visualiasasi dalam bentuk VCD sebanyak 100 keping,

3.2.2. Pembinaan dan pengembangan kerjasama, meliputi kegiatan:

3.2.2.1. TMMD

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke LXXI di kabupaten Lamongan merupakan program terpadu antara TNI dengan Pemerintah kabupaten Lamongan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan di daerah

pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Program TMMD ke LXXI di Kabupaten Lamongan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, dana yang telah disediakan dan jadwal waktu yang telah ditentukan, sehingga mampu menyelesaikan kegiatan TMMD di Desa Talunrejo Kecamatan Bluluk mulai Pra TMMD tanggal 21 Juli 2003 s/d 2 Agustus 2003 (12 hari) ; dan Pelaksanaan TMMD mulai tanggal 9 September 2003 s/d 29 September 2003 (21 hari).

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam program TMMD ke LXXI di Kabupaten Lamongan adalah :

Tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan TMMD, khususnya pengerahan pasukan ditentukan oleh Mabes TNI dan Kodam V Brawijaya, sehingga kegiatan di Kabupaten Lamongan menunggu surat/informasi dari TNI, sehingga menghambat proses pencairan anggaran APBD Kabupaten Lamongan.

Untuk mengantisipasi terhadap permasalahan tersebut diatas telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

Secara terus menerus dilakukan koordinasi dengan Mabes TNI dan Kodam V Brawijaya akan rencana pelaksanaan TMMD di Kabupaten Lamongan.

3.2.2.2. Program Pengembangan Kecamatan

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program nasional penanggulangan kemiskinan. Salah satu bentuk upaya penanggulangan kemiskinan itu adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang mulai

dilaksanakan pada tahun 1998/1999. PPK melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemampuan yang bertumpu pada azas dari, oleh, dan untuk masyarakat atau pembangunan yang digerakkan masyarakat (Community driven development). Adapun tujuannya adalah :

- a. Meningkatkan kegiatan usaha produktif bagi masyarakat miskin ;
- b. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana sosial ekonomi, termasuk pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelestarian hasil kegiatan.
- d. Mengembangkan partisipasi dan keterlibatan kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan kegiatan.

3.2.2.3. Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan

Meningkatnya angka Rumah Tangga Miskin di perkotaan di Kabupaten Lamongan serta banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan berakibat meningkatnya pengangguran, meningkatnya kebutuhan pelayanan umum dasar masyarakat Perkotaan serta perlunya pengembangan kekuatan kelembagaan yang ada di masyarakat Kabupaten Lamongan, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan.

Masukan kegiatan ini dibiayai dari APBD sebesar Rp. 409.655.000,00, adapun keluaran dari kegiatan ini

adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di perkotaan

Hambatan dan kendala yang dijumpai selama kegiatan berlangsung adalah lambatnya proses pembelajaran dalam penanganan pada umumnya terjadi pada proses pembentukan kelembagaan di tingkat desa (Badan Keswadayaan Masyarakat/BKM) dan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Masyarakat berupa Penyusunan PJM-Pronangkis dan Rencana Kerja Tahunan. Adapun langkah antisipasinya adalah perlunya ketekunan dan keterpaduan seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan proyek P 2 KP tahap II mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai di Desa serta perlunya peningkatan sistem koordinasi antar lembaga/bidang ataupun pelaku pelaksana kegiatan dan forum Komunikasi antar Pelaku (FKA-BKM)

3.2.2.4. Program kerjasama dengan UNICEF

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas SDM dini melalui program Kelangsungan Hidup, Perkembangan, Perlindungan Ibu dan Anak melalui usaha kerjasama dengan berbagai pihak khususnya dengan Unicef

Masukan untuk kegiatan ini dibiayai dari APBD sebesar Rp. 210.000.000,00 dimana dalam pelaksanaannya melibatkan unit kerja lain di Pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kantor Catatan Sipil. Keluaran dari kegiatan ini adalah PITA kesehatan yang berupa alat bantu timbang dan bantuan garam beryodium, Penerapan konsep MBS (Murid Belajar Sendiri),

Sosialisasi akte kelahiran dan santunan anak tak'mampu, Sosialisasi perlindungan anak. Adapun hasil dari kegiatan ini yang dirasakan oleh masyarakat adalah tersedianya alat bantu timbang dan tersedianya stok awal garam beryodium, diketahuinya konsep MBS oleh seluruh guru dan siswa, diketahuinya prosedur permohonan akte kelahiran, serta diketahuinya hak perlindungan anak. Adapun manfaat kegiatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan ibu dan anak dengan target kinerja sebesar 60 %. Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas SDM Dini.

3.2.2.5. Integrasi Gerdutaskin

Maksud dari kegiatan ini adalah upaya Peningkatan kapasitas ekonomi melalui pengembangan usaha dan berusaha serta sumberdaya, menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat yang mendukung pengembangan ekonomi produktif masyarakat, mewujudkan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan Desa, mewujudkan keterpaduan peran antar pelaku pembangunan dan mengembangkan pengelolaan sistem pembangunan secara partisipatif.

Masukan dalam kegiatan ini adalah dibiayai sebesar Rp. 801.000.000,00, keluaran kegiatan ini berupa pemberdayaan lingkungan di 23 desa, pemberdayaan manusia di 10 desa, pemberdayaan usaha di 10 desa. Adapun hasil kegiatan ini adalah tersedianya sarana prasarana lingkungan di 23 desa, meningkatnya SDM di 10 desa, serta meningkatnya daya saing usaha di 10 desa. Manfaat kegiatan ini adalah percepatan pengentasan

kemiskinan dipengaruhi adanya kegiatan ini sebesar 20 %. Adapun dampak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah kesejahteraan masyarakat meningkat sebesar 40 %.

Hambatan dan kendala yang dijumpai selama kegiatan berlangsung, pada umumnya terjadi terhadap aparat desa (Kades, UPK) dalam hal mengidentifikasi dalam rangka penyusunan DURK yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga masih diperlukan supervisi dari lembaga atasannya disamping masih lemahnya akses koordinasi antara pelaku pelaksana program. Sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah : masih dijumpai data RTM yang kurang valid sehingga dalam hal menentukan sasaran juga kurang tepat namun limit eror sasaran masih dalam taraf toleransi dan masih adanya RTM yang belum tahu/mengerti terhadap makna program dan hanya sekedar menerima program.

Adapun langkah antisipasinya adalah :

1. Diperlukan sistem pendataan RTM yang lebih spesifik dan akurat sehingga dalam rangka penyusunan strategi pembangunan pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan tepat program
2. Diperlukan peningkatan sistem koordinasi antar lembaga/bidang ataupun pelaku pelaksana kegiatan
3. Diperlukannya sosialisasi yang lebih gencar terhadap program gerdu taskin kepada masyarakat penerima oleh aparat desa

3.2.2.6. Program P2TPD

Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) / Initiatives Local Governance Reform (ILGR)

adalah Program yang bertujuan membantu kabupaten yang mempunyai komitmen tinggi terhadap Reformasi untuk meningkatkan kualitas Tata-Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan mengurangi kemiskinan. Melalui Reformasi ini diharapkan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan Pembangunan Daerah dapat lebih berpihak kepada upaya-upaya pengurangan kemiskinan dan meningkatkan efisiensi anggaran serta efektifitas investasi.

P2TPD merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dengan support Bank Dunia yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten. Sebagai proyek percontohan, telah ada 22 Kabupaten yang dipilih dari seluruh Indonesia dan dimulai secara bertahap pada bulan Oktober 2002 s/d Juli 2003.

Masukan dalam kegiatan ini adalah sebesar Rp. 50.000.000,00, sedangkan keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya assesmen analisis kemiskinan partisipatif di 6 desa dan terbentuknya Tim Pokja, sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah sebagai dokumen untuk penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan, sedangkan manfaat kegiatan ini adalah meningkatnya kelancaran pelaksanaan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Adapun dampak yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya tata pemerintahan yang good governance dalam pelaksanaan program pembangunan.

3.2.2.7. Sosialisasi dan Pemantauan Program PKPS-BBM

Kegiatan Sosialisasi dan Pemantauan Pelaksanaan PKPS-BBM adalah untuk membantu terwujudnya dan

kelancaran pelaksanaan program PKPS-BBM di Kabupaten Lamongan serta agar masyarakat luas dapat memahami dan mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Masukan kegiatan ini dibiayai dari APBD sebesar Rp, 60.000.000,00, adapun keluaran kegiatan ini adalah koordinasi tentang pelaksanaan program PKPS-BBM, Sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program PKPS-BBM. Hasil kegiatan ini adalah terlaksananya pelaksanaan program, adanya kesamaan pemahaman terhadap program, evaluasi serta pemantauan program PKPS-BBM.

3.2.2.8. P2MPD

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk peningkatan kapasitas ekonomi melalui pengembangan dan peningkatan fungsi sarana dan prasarana dasar, mewujudkan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa, mewujudkan keterpaduan peran antar pelaku pembangunan dan mengembangkan pengelolaan sistem pembangunan secara partisipatif.

Masukan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.719.480.000,00, sedangkan keluarannya adalah Pembangunan sarana prasarana Type A di 54 desa dan pembangunan sarana prasarana Type B di 14 desa. Hasil kegiatan ini adalah Tersedianya sarana prasarana dasar di 68 desa tertinggal. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya sarana prasarana dasar di desa tertinggal. Sedangkan dampak yang diharapkan dari kegiatan ini

adalah meningkatnya percepatan pengentasan kemiskinan di desa tertinggal sebesar 60 %.

Hambatan dan kendala yang dijumpai selama kegiatan berlangsung, pada umumnya terjadi terhadap aparat desa (Kades, LPM) dalam hal mengidentifikasi dalam rangka penyusunan proposal yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga masih diperlukan supervisi dari lembaga atasannya disamping masih lemahnya akses koordinasi antara pelaku pelaksana program.

4. Akuntabilitas Keuangan

Program	Kegiatan	Rencana Biaya	Realisasi	%
1.1.1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah.	1.1.1.1. Belanja barang dan pemeliharaan	Rp 518.250.000	Rp 287.516.830	90,34
1.1.2. Peningkatan efisiensi dan pendayagunaan aparatur pemerintah	1.1.2.1. Belanja Pegawai dan perjalanan dinas	Rp 1.109.356.000	Rp 953.747.822	85,93
	1.1.2.2. Laporan Pertanggung jawaban Bupati (LPJ)	Rp 150.000.000	Rp 149.999.500	100,00
1.1.3. Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah	1.1.3.1. Sosialisasi dan penggandaan Renstra	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	100,00
2.1.1. Penataan Ruang dan Wilayah	2.1.1.1. RUTRK/RDTRK	Rp 150.000.000	Rp 149.655.000	99,77
	2.1.1.2. Masterplan pengelolaan sumberdaya air dan jaringan irigasi	Rp 120.000.000	Rp 119.282.000	99,40
	2.1.1.3. Masterplan pengembangan komoditi pertanian	Rp 190.000.000	Rp 189.910.000	99,95
	2.1.1.4. Pemetaan wilayah pesisir dan laut	Rp 75.000.000	Rp 74.767.500	99,69
2.1.2. Penelitian pendukung perencanaan pembangunan	2.1.2.1. Penelitian Pondok Pesantren dimasyarakat pemberdayaan masyarakat	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	100,00
2.1.3. Perencanaan Pembangunan Daerah	2.1.3.1. Perencanaan Pembangunan Kota Mandiri	Rp 310.000.000	Rp -	-
	2.1.3.2. Arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD	Rp 85.000.000	Rp 85.000.000	100,00
	2.1.3.3. Perencanaan umum survey, study kelayakan dan evaluasi pengendalian	Rp 175.000.000	Rp 174.999.500	100,00
2.2.1 Penyempurnaan dan pengembangan statistik	2.2.1.1. Lamongan Dalam Angka dan Indeks Pembangunan Manusia	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000	100,00
	2.2.1.2. PDRB	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	100,00
	2.2.1.3. Pengadaan Peta Dasar	Rp 15.000.000	Rp 14.980.000	99,87

Program	Kegiatan	Rencana Biaya	Realisasi	%
2.2.2. Inventarisasi dan evaluasi sumberdaya	2.2.2.1. Validasi Data Desa/ Kelurahan dan Keluarga Miskin di Kabupaten Lamongan	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	100,00
2.2.3 Pengembangan Sistem Informasi	2.2.3.1. SIM Jalan	Rp 75.000.000	Rp 74.910.000	99,88
	2.2.3.2. Lamongan Meningsing Fajar Serie II	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	100,00
3.1.2. Pembinaan dan pengembangan kerjasama	3.1.2.1 TMMD	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	100,00
	3.1.2.2 Program Pengembangan Kecamatan	Rp 60.937.500	Rp 60.937.500	100,00
	3.1.2.3 Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan	Rp 409.655.000	Rp 409.655.000	100,00
	3.1.2.4 Program Kerjasama dengan UNICEF	Rp 210.000.000	Rp 209.270.000	99,65
	3.1.2.5 Integrasi GERDU TASKIN	Rp 801.000.000	Rp 801.000.000	100,00
	3.1.2.6 Program P2TPD	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	100,00
	3.1.2.7 Sosialisasi dan Pemanfaatan Program PKPS-BBM	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	100,00
	3.1.2.8 P2MPD	Rp 2.719.480.000	Rp 2.714.879.279	99,83

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Akuntabilitas BAPPEDA Kabupaten Lamongan merupakan salah satu langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja dari Tahun anggaran 2003, yang hasilnya masih memerlukan integrasi antara kemampuan sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global maupun dalam pelaksanaan otonomi daerah serta aplikasinya.

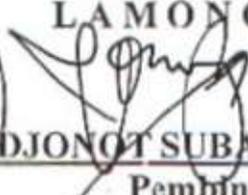
Untuk pelaksanaan tugas BAPPEDA Kabupaten Lamongan (Akuntabilitas) pada Tahun anggaran 2003 secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan program dan jadwal yang telah ditetapkan, kecuali kegiatan penyusunan Perembaraan Pembangunan Kota Mandiri tidak dapat dilaksanakan karena adanya defisit ekonomi yang terjadi pada PT. SIER. Walaupun dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2003 ada permasalahan-permasalahan dan kendala-kendala, namun dapat diselesaikan dan dicapai solusinya, sebagaimana tersebut pada Bab II, sehingga tidak mengganggu ketepatan pelaksanaan kerjanya.

Namun demikian, dalam rangka mempersiapkan Kabupaten Lamongan dalam menyongsong pelaksanaan otonomi daerah, masih perlu adanya peningkatan kerjanya pada tahun-tahun yang akan datang, sehingga Kabupaten Lamongan mampu mengurus dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan bagi kepentingan dan kesejahteraan daerah.

Dengan telah tersusunnya akuntabilitas ini diharapkan dapat mendorong staf dan karyawan BAPPEDA Kabupaten Lamongan untuk menjadi lebih akuntable dalam melaksanakan misi organisasi guna mewujudkan visi organisasi BAPPEDA Kabupaten Lamongan.



KEPALA BAPPEDA KABUPATEN
LAMONGAN


Ir. DJONOT SUBAGIJO, MM.

Pembina

NIP. 510 061 432

RENCANA STRATEGIK TAHUN 2002 - 2006

INSTANSI : BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN

VISI : Menjadikan BAPPEDA sebagai Perencana Pembangunan yang Profesional untuk Kesejahteraan Masyarakat

MISI : Meningkatkan kemampuan sumberdaya BAPPEDA dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berkualitas

FORM : RS

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
Mewujudkan pelaksanaan Perda Nomor 07 Tahun 2000 dan Tupoksi BAPPEDA untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 serta tingginya tuntutan masyarakat akan kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatnya Kinerja SDM	Jumlah yang dilatih : Sosialisasi Renstra	1.1. Mengoptimalkan kinerja SDM, sarana dan prasarana serta dukungan	1.1.1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah. 1.1.2. Peningkatan efisiensi dan pendayagunaan aparatur pemerintah 1.1.3. Pendidikan dan pelatihan aparatur	1.1.1.1. Belanja barang dan pemeliharaan 1.1.2.1. Belanja Pegawai dan perjalanan dinas 1.1.2.2. Laporan Pertanggungjawaban Bupati (LPJ) 1.1.3.1. Sosialisasi dan penggandaan Renstra

RENCANA STRATEGIK TAHUN 2002 - 2006

INSTANSI : BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN

VISI : Menjadikan BAPPEDA sebagai Perencana Pembangunan yang Profesional untuk Kesejahteraan Masyarakat

MISI : 1.Meningkatkan validitas dan akurasi data dalam rangka penelitian dan penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, fisik prasarana dan sosial budaya guna mendorong perkembangan dan kemajuan masyarakat

FORM : RS

TUJUAN	SASARAN		CAKUPAN MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
Mewujudkan ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan yang valid dan akurat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan mengantisipasi ketatnya persaingan antar daerah	2. Terwujudnya data dan perencanaan detail pembangunan daerah	<p>Tersusunnya / tersedianya dokumen/data - data yang digunakan bagi perencanaan pembangunan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 RUTRK/RDTRK 2 Masterplan Pengelolaan SDA dan Jaringan Irigasi 3 Masterplan Pengembangan komoditi pertanian 4 Pemetaan wilayah pesisir dan laut 5 SIM Jalan 6 Pembangunan Kota Mandiri 7 AKU dan Strategi Prioritas APBD 8 Perencanaan umum, survey, studi kelayakan dan evaluasi 9 LPJ Bupati 10 Lamongan Dalam Angka dan IPM 11 PDRB 12 Pengadaan Peta Dasar 	2.1. Mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi BAPPEDA melalui peningkatan perencanaan pembangunan daerah dan fungsi administrasi BAPPEDA	<p>2.1.1. Penataan Ruang dan Wilayah</p> <p>2.1.2. Penelitian pendukung perencanaan pembangunan</p> <p>2.1.3. Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	<p>2.1.1.1 RUTRK/RDTRK</p> <p>2.1.1.2. Masterplan pengelolaan sum-berdaya air dan jaringan irigasi</p> <p>2.1.1.3. Masterplan pengembangan komoditi pertanian</p> <p>2.1.1.4. Pemetaan wilayah pesisir dan laut</p> <p>2.1.2.1 Penelitian Pondok Pesantren dim pemberdayaan masyarakat</p> <p>2.1.3.1. Perencanaan Pembangunan Kota Mandiri</p> <p>2.1.3.2. Arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD</p> <p>2.1.3.3. Perencanaan umum survey, study kelayakan dan evaluasi pengendalian</p>

TAHUN 2002 - 2006

INSTANSI : BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN
VISI : Menjadikan BAPPEDA sebagai Perencana Pembangunan yang Profesional untuk Kesejahteraan Masyarakat
MISI : 1. Memantapkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan serta menjadi motor penggerak dalam menetapkan strategi, konsep-konsep kebijakan perencanaan pembangunan daerah

FORM : RS

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
Mewujudkan keterpaduan produk dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang strategis	3. Meningkatnya koordinasi, monitoring dan pembinaan	Terlaksananya koordinasi, monitoring dan pembinaan : 1 Proyek PPK 2 Proyek P2KP 3 Proyek P2MPD 4 Integrasi Gerdu Taskin 5 UNICEF 6 PKPS-BBM 7 P2TPD 8 TMMD	3.1. Mewujudkan kemampuan daya saing daerah dengan peningkatan sumber-sumber informasi dan melakukan promosi daerah.	3.1.2. Pembinaan dan pengem	3.1.2.1 TMMD 3.1.2.2 Program Pengembangan Kecamatan 3.1.2.3 Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan 3.1.2.4 Program Kerjasama 3.1.2.5 Integrasi GERDU TASKIN 3.1.2.6 Program P2TPD 3.1.2.7 Sosialisasi dan Pemanfaatan Program PKPS- 3.1.2.8 P2MPD

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Tahun 2003

Form : RKT

: BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN

INSTANSI

SASARAN		Program	Uraian	Kegiatan			Keterangan
Uraian	Indikator			Rencana Tingkat Capaian (Target)	Indikator Kinerja	Satuan	
1. Meningkatnya Kinerja SDM	1 Jumlah yang dilatih 1 Sosialisasi Renstra	1.1.2. Peningkatan efisiensi dan pendayagunaan aparatur pemerintah	1.1.2.2 Laporan Pertanggungjawaban Bupati (LPJ)	Dana - Laporan hasil pelaksanaan pembangunan - Visualisasi hasil pelaksanaan pembangunan - Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan pembangunan Kesesuaian pembangunan dengan APBD 2002 Terbit pelaksanaan pembangunan	Rupiah Paket Paket Paket Prosen Prosen	150,000,000.00 2 1 1 100 90	
		1.1.3. Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah	1.1.3.1 Sosialisasi dan pengandaian Renstra	Dana - Pengandaian Dokumen Renstrada - Sosialisasi Renstrada - Dikotahuinya rencana strategis daerah oleh aparat dan masyarakat - Kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan masyarakat - Derajat kehidupan masyarakat meningkat	Rupiah Unit Kali orang Prosen Prosen	60,000,000.00 250 1 250 100 90	
2. Terwujudnya data dan perencanaan detail pembangunan daerah.	1 Tersusunnya / tersedianya dokumentasi - data yang digunakan bagi perencanaan pembangunan : 1 RUTRKR/DRTRK 2 Monev dan Jaringan Iktis SDA dan Jaringan Iktis 3 Monev dan Jaringan Iktis SDA dan Jaringan Iktis 4 Pemetaan wilayah peristirahatan dan laut	2.1.1. Penataan Ruang Wilayah	2.1.1.1 RUTRKR/DRTRK	Dana - Laporan Pendahuluan - Kompilasi Data - Buku Analisa - Buku Rencana - Album Foto - Tersedianya dokumen RUTRKR/DRTRK - Pengendalian pembangunan di wilayah IKK - Meningkatnya Keterlibatan pelaksanaan pembangunan di IKK	Rupiah Unit Unit Unit Unit Unit (Kecamatan) Prosen Prosen	150,000,000.00 5 10 10 20 5 3 50 20	

SASARAN			Program	Kegiatan				Keterangan	
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		
5	SIM Jalan	1 unit		2.1.1.2. Masterplan pengelolaan sumberdaya air dan jaringan irigasi	Masukan	Dana	Rupiah	120,000,000.00	
6	Pembangunan Kota Mandiri	1 unit			Keluaran	- Laporan Pendahuluan	Unit	10	
7	AKU dan Strategi Prioritas APBD	2 unit				- Fakta dan Analisa	Unit	10	
8	Perencanaan umum, survey, studi kelayakan dan evaluasi pengendalian	3 kegiatan			Hasil	- Laporan akhir	Unit	10	
10	Lamongan Dalam Angka dan IPM	2 unit				- Album Peta	Unit	10	
11	PDRB	100 eks			Manfaat	Tersedianya dokumen Masterplan pengelolaan sumber air dan jaringan irigasi	Unit	1	
12	Pengadaan Peta Dasar	100 lembar			Dampak	Keterpaduan pelaksanaan pengelolaan sumber air dan jaringan irigasi	Prosen	60	
14	Lamongan Menyingsing Fajar Serie II	100 keping				Terjaminnya ketersediaan air dan menurunnya tingkat banjir	Prosen	30	
15	Penelitian Pondok Pesantren dan pemberdayaan masyarakat	10 buku			2.1.1.3. Masterplan pengembangan komoditi pertanian	Masukan	Dana	Rupiah	190,000,000.00
						Keluaran	- Laporan Pendahuluan	Buah	10
							- Laporan Kemajuan	Buah	10
							- Draft Laporan akhir	Buah	10
							- Executive Summary	Buah	50
						Hasil	- Album Peta	Buah	10
							Tersedianya dokumen Masterplan pengembangan komoditi pertanian	Unit	15
				Manfaat	Peningkatan informasi untuk pengembangan di bidang Pertanian	Prosen	60		
				Dampak	Terwujudnya pengembangan komoditi pertanian yg menguntungkan.	Prosen	30		
			2.1.1.4. Pemetaan wilayah pesisir dan laut	Masukan	Dana	Rupiah	75,000,000.00		
				Keluaran	- Laporan Pendahuluan	Unit	10		
					- Laporan Kemajuan	Unit	10		
					- Draft Laporan akhir	Unit	10		
					- Executive Summary	Unit	50		
				Hasil	- Album Peta	Unit	10		
					Tersedianya dokumen Masterplan pengembangan komoditi pertanian	Unit	15		
				Manfaat	Peningkatan informasi untuk pengembangan potensi wilayah Pesisir & Laut	Prosen	60		
				Dampak	Terwujudnya pengembangan potensi & jenis usaha di Wilayah yg berbasis sumber daya perikanan	Prosen	30		

SASARAN			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
			2.1.2. Penelitian perencanaan pembangunan pendukung pembangunan	2.1.2.1. Penelitian Peran Pondok Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat di Kab Lamongan	Masukan : Dana Keluaran : Draft Laporan penelitian Hasil : Laporan Akhir penelitian Manfaat : Terwujudnya dokumen hasil penelitian Mantaat : Optimalisasi peran pondok pesantren dalam perencanaan pembangunan Dampak : Meningkatnya peran pondok pesantren	Rupiah buku buku buku prosen prosen	50,000,000.00 10 10 10 70 60	
			2.1.3 Perencanaan Pembangunan Daerah	2.1.3.1. Perencanaan Pembangunan Kota Mandiri	Masukan : Dana Keluaran : Bantuan Pembuatan Masterplan Pembangunan Hasil : Draft Report Manfaat : Final Report Dampak : Arah pembangunan Kota Mandiri Manfaat : Terwujudnya pembangunan kawasan industri di Kota Mandiri Dampak : Derajat kehidupan masyarakat meningkat	Rupiah Buku Buku Prosen Prosen Prosen	310,000,000.00 2 2 100 100 20	
				2.1.3.2. Arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD	Masukan : Dana Keluaran : Draft AKU APBD 2004 Hasil : Laporan Final AKU APBD 2004 Manfaat : Draft Strategi dan Prioritas APBD 2004 Dampak : Lap Final Strategi dan Prioritas APBD 2004 Manfaat : Arah pelaksanaan pembangunan tahun 2004 Dampak : Kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan masyarakat Dampak : Derajat kehidupan masyarakat meningkat	Rupiah Buku Buku Buku Buku Prosen Prosen Prosen	85,000,000.00 200 200 200 200 100 70 20	
				2.1.3.3 Perencanaan umum survey, studi kelayakan dan evaluasi pengendalian	Masukan : Dana Keluaran : UDKP Hasil : Survey usulan pembangunan Dampak : Rakorbang Dampak : Usulan pelaksanaan pembangunan tahun 2004	Rupiah Paket kegiatan Paket kegiatan Kegiatan Paket	175,000,000.00 3 2 3 1	

SASARAN			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
					Manfaat : Kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan masyarakat	Prosen	70	
					Dampak : Derajat kehidupan masyarakat meningkat	Prosen	20	
		2.2.1 Penyempurnaan dan pengembangan statistik	2.2.1.1 Lamongan Dalam Angka dan Indeks Pembangunan Manusia	Masukan Keluaran	: Dana - LDA - IPM	Rupiah Buku Buku	70,000,000.00 100 162	
				Hasil	: Tersedianya dokumen LDA dan IPM per kecamatan	Buku	262	
				Manfaat	: Pengambilan kebijakan perencanaan berdasarkan data perencanaan	Prosen	80	
				Dampak	: Akurasi data	Prosen	90	
			2.2.1.2. PDRB	Masukan Keluaran Hasil	: Dana - PDRB - Tersedianya dokumen PDRB per kecamatan	Rupiah Buku Buku	30,000,000.00 100 100	
				Manfaat	: Pengambilan kebijakan perencanaan berdasarkan data perencanaan	Prosen	80	
				Dampak	: Perencanaan sesuai dengan kondisi perekonomian Lokal, regional dan nasional	Prosen	50	
			2.2.1.3. Pengaiaan Peta Dasar	Masukan Keluaran	: Dana - Peta Administrasi Lamongan	Rupiah Buah	15,000,000.00 100	
				Hasil	: Tersedianya Peta Administrasi Lamongan	Buah	100	
				Manfaat	: Pengambilan kebijakan perencanaan berdasarkan data perencanaan	Prosen	80	
				Dampak	: Perencanaan sesuai dengan data yang tersedia	Prosen	50	
		2.2.2 Inventarisasi dan evaluasi sumber-daya	2.2.2.1 Validasi Data Desa/ Kelurahan dan Keluarga Miskin di Kabupaten Lamongan	Masukan Keluaran	: Dana - Pendataan ulang desa/ kelurahan dan rumah tangga miskin	Rupiah Kecamatan	150,000,000.00 27	
				Hasil	: Tersedianya data desa/ kelurahan dan rumah tangga miskin	buku CD	10 10	
				Manfaat	: Pedoman perencanaan pengentasan kemiskinan	Prosen	80	
				Dampak	: Tepat sasaran kegiatan pengentasan kemiskinan	Prosen	80	

SASARAN		Program	Kegiatan			Keterangan	
Uraian	Indikator		Rencana Tingkat Capaian (Target)	Uraian	Indikator Kinerja		Satuan
		2.2.3. Pengembangan Sistem Informasi	2.2.3.1. SIM Jalan	Masukan Keluaran	Dana - Laporan Pendahuluan - Dokumen SOP/Manual HW - Software aplikasi - Materi Pelatihan - Laporan Akhir - CVD SIM Jalan - Tersedianya informasi mengenai kondisi jalan kabupaten - Dokumen pendukung perencanaan pembangunan jalan poros desa dan kabupaten - Kesesuaian perencanaan pembangunan jalan dengan SIM Jalan	Rupiah Buku Paket Paket Buku Keeping Paket Prosen Prosen	75.000.000,00 5 10 1 25 10 15 1 VCD 60 60
			2.2.3.2. Lamongan Fajar Serie II	Masukan Keluaran	Dana - Informasi mengenai potensi dan pariwisata Kabupaten Lamongan - Tersedianya dokumen tentang potensi Kabupaten Lamongan - Dokumen pendukung pembangunan Daerah - Tersedianya sistem informasi yang aktual	Rupiah VCD VCD Prosen Prosen	75.000.000,00 100 100 20 30
3. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan pembinaan		3.1.2. Pembinaan dan pengembangan kerja sama	3.1.2.1. TMMD	Masukan Keluaran	Dana - Pemb Jalan Makadam - Rehab Jembatan - Rehab Masjid - Penyuluhan Hukum, Pajak - Retribusi, perijinan dan Bantuan bibit bawang, mangga dan pohon jati - Tersedianya sarana jalan, jembatan dan masjid yang Pemahaman masyarakat tentang hukum, pajak, retribusi, perijinan dan Simduk - Terbukanya akses ekonomi masyarakat desa - Meningkatkan kesadaran masyarakat atas hukum, pajak, retribusi, perijinan dan SIMDUK	Rupiah m m' Buah Paket Kg Prosen Prosen desa Prosen	150.000.000,00 2.300 x 2,5 m 5 x 2,7 m 2 1 9000 70 60 1 60
				Hasil			
				Manfaat			
				Dampak			
				Masukan Keluaran			
				Hasil			
				Manfaat			
				Dampak			
				Masukan Keluaran			
				Hasil			
				Manfaat			
				Dampak			

SASARAN			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
				Hasil	- Tersedianya alat bantu timbang dan penyediaan awal stok awal untuk modal garam beryodium - Meningkatnya pengetahuan Konsep MBS - Diketuainya prosedur permohonan akte kelahiran - Diketuainya hak perlindungan anak	unit unit usaha kasek dan guru SD/MI anak kecamatan	50 27 16 750 27	
				Manfaat	: Kesejahteraan ibu dan anak	Prosen	60	
				Dampak	: Peningkatan kualitas SDM diri	Prosen	20	
			3.1.2.5. Integrasi GERDU TASKIN	Masukan	: Dana	Rupiah	801,000,000.00	
				Keluaran	- Pemberdayaan lingkungan - Pemberdayaan manusia - Pemberdayaan usaha - Pemberdayaan lingkungan	Desa Desa Desa Desa	23 10 10 23	
				Hasil	- Pemberdayaan manusia - Pemberdayaan usaha	Desa Desa	10 10	
				Manfaat	Membantu percepatan pengentasan kemiskinan	prosen	20	
				Dampak	Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat	prosen	40	
			4.2.6. Program P2TPD	Masukan	: Dana	Rupiah	50,000,000.00	
				Keluaran	- Tersusunnya hasil assesmen analisis kemiskinan partisipatif - Pembentukan Tim Pokja	Desa Tim Pokja	6 1	
				Hasil	- Meningkatnya kelancaran pelaksanaan desentralisasi dan totemi daerah	prosen	50	
				Manfaat	Hasil assesmen AKP sebagai dokumen untuk penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan	prosen	60	
				Dampak	Meningkatnya tata pemerintahan yang good governance dalam pelaksanaan program pembangunan	prosen	50	

INSTANSI

BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN			Program	Kegiatan				Keterangan	
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		
				3.1.2.7. Pendukung Pelaksanaan Program PKPS-BBM	Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak	- Dana - Koordinasi pelaksanaan program - Sosialisasi Program PKPS-BBM - Pemantauan - Evaluasi - Penyelesaian pelaksanaan program - Pemahaman pelaksanaan program - Pemantauan perkembangan pelaksanaan program - Laporan hasil kegiatan - Mendukung kelancaran pelaksanaan program Meningkatkan kualitas pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat	Rupiah instansi Desa Kecamatan Kecamatan Prosen Prosen Prosen Prosen Prosen Prosen Prosen	60,000,000.00 11 465 27 27 90 75 80 80 90 90	
				3.1.2.8. P2MPD	Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak	- Dana - Pekerjaan Type A - Pekerjaan Type B - Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dengan sistem pemberdayaan - Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dengan sistem kontraktual - Desentralisasi pemerintahan - Pemberdayaan masyarakat - Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana Membantu percepatan pengentasan kemiskinan	Rupiah Desa Desa Desa Desa prosen prosen prosen prosen	2,719,480,000.00 54 14 54 14 70 70 70 60	

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Tahun 2003

INSTANSI

BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN

Form : PKK

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1.1.2. Peningkatan efisiensi dan pendayagunaan aparatur pemerintah	1.1.2.2. Laporan Pertanggungjawaban Bupati (LPJ)	Masukan : Dana	Rupiah	150,000,000.00	150,000,000.00	100%	
		Keluaran : Laporan hasil pelaksanaan pembangunan	Paket	2	2	100%	
		Hasil : Visualisasi hasil pelaksanaan pembangunan	Paket	1	1	100%	
		Manfaat : Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan pembangunan	Paket	1	1	100%	
		Dampak : Kesesuaian pembangunan dengan APBD 2002	Prosen	100	100	100%	
		Dampak : Tertib pelaksanaan pembangunan	Prosen	90	90	100%	
1.1.3. Pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah	1.1.3.1. Sosialisasi dan penggandaan Renstra	Masukan : Dana	Rupiah	60,000,000.00	60,000,000.00	100%	
		Keluaran : Penggandaan Dokumen Renstrada	Unit	250	250	100%	
		Hasil : Sosialisasi Renstrada	Kali orang	1	1	100%	
		Manfaat : Diketuainya rencana strategis daerah oleh aparat dan masyarakat	Prosen	100	100	100%	
		Dampak : Kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan masyarakat	Prosen	90	90	100%	
		Dampak : Derajat kehidupan masyarakat meningkat	Prosen	90	90	100%	
2.1.1. Penataan Ruang dan Wilayah	2.1.1.1. RUTRW/ROTRK	Masukan : Dana	Rupiah	150,000,000.00	150,000,000.00	100%	
		Keluaran : Laporan Pendahuluan	Unit	5	5	100%	
			Unit	10	10	100%	
			Unit	10	10	100%	
			Unit	20	20	100%	
			Unit	5	5	100%	
		Hasil : Tersedianya dokumen RUTRK/ROTRK	Unit (Kecamatan)	3	3	100%	
		Manfaat : Pengendalian pembangunan di wilayah IKK	Prosen	50	50	100%	
Dampak : Meningkatnya Ketertiban pelaksanaan pembangunan di IKK	Prosen	20	20	100%			

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan		
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi				
2.1.1.2. Masterplan pengelolaan sumberdaya air dan jaringan irigasi	Masukan	Dana	Rupiah	120,000,000.00	120,000,000.00	100%			
		Keluaran	- Laporan Pendahuluan	Unit	10	10		100%	
			- Fakta dan Analisa	Unit	10	10		100%	
			- Laporan akhir	Unit	10	10		100%	
			- Album Peta	Unit	10	10		100%	
			Hasil	Tersedianya dokumen Masterplan pengelolaan sumber air dan jaringan irigasi	Unit	1		1	100%
	Manfaat	Keterpaduan pelaksanaan pengelolaan sumber air dan jaringan irigasi	Prosen	60	60	100%			
		Dampak	Terjaminnya ketersediaan air dan menurunnya tingkat banjir	Prosen	30	30		100%	
	2.1.1.3 Masterplan pengembangan komoditi pertanian	Masukan	Dana	Rupiah	190,000,000.00	190,000,000.00		100%	
			Keluaran	- Laporan Pendahuluan	Buah	10		10	100%
				- Laporan Kemajuan	Buah	10		10	100%
				- Draft Laporan akhir	Buah	10		10	100%
- Executive Summary				Buah	50	50	100%		
- Album Peta				Buah	10	10	100%		
Hasil		Tersedianya dokumen Masterplan pengembangan komoditi pertanian	Unit	15	15	100%			
Manfaat		Peningkatan informasi untuk pengembangan di bidang Pertanian	Prosen	60	60	100%			
		Dampak	Terwujudnya pengembangan komoditi pertanian yg menguntungkan.	Prosen	30	30	100%		
2.1.1.4. Pemetaan wlayah pesisir dan laut		Masukan	Dana	Rupiah	75,000,000.00	75,000,000.00	100%		
			Keluaran	- Laporan Pendahuluan	Unit	10	10	100%	
				- Laporan Kemajuan	Unit	10	10	100%	
	- Draft Laporan akhir			Unit	10	10	100%		
	- Executive Summary			Unit	50	50	100%		
	- Album Peta			Unit	10	10	100%		
	Hasil	Tersedianya dokumen Masterplan pengembangan komoditi pertanian	Unit	15	15	100%			

Program	Kegiatan				Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)		
2.1.2 Penelitian pendukung perencanaan pembangunan		Manfaat : Peningkatan informasi untuk pengembangan potensi wil. Pesisir & Laut Dampak : Terwujudnya pengembangan an potensi & jenis usaha di Wil yg berbasis sumber daya perikanan	Dana Draft Laporan penelitian, Laporan Akhir penelitian Terwujudnya dokumen hasil penelitian	Prosen Prosen	60 30	100% 100%
2.1.3. Perencanaan ngunan Daerah		Masukan Keluaran	Dana Bantuan Pembuatan Masterplan Pembangunan - Draft Report - Final Report	Rupiah Buku Buku Prosen Prosen Prosen	310,000,000.00 2 2 100 100 20	0% 0% 0% 0% 0% 0%
		Manfaat Dampak	Dana Draft AKU APBD 2004 - Laporan Final AKU APBD 2004 Draft Strategi dan Prioritas APBD 2004 Lap Final Strategi dan Prioritas APBD 2004 Arahlan pelaksanaan pembangunan tahun 2004 Kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan masyarakat	Rupiah Buku Buku Buku Buku Prosen Prosen	85,000,000.00 200 200 200 200 100 70	100% 100% 100% 100% 100% 100%
		Masukan Keluaran	Dana Draft AKU APBD 2004 - Laporan Final AKU APBD 2004 Draft Strategi dan Prioritas APBD 2004 Lap Final Strategi dan Prioritas APBD 2004 Arahlan pelaksanaan pembangunan tahun 2004 Kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan masyarakat	Rupiah Buku Buku Buku Buku Prosen Prosen	85,000,000.00 200 200 200 200 100 70	100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
		Dampak : Derajat kehidupan masyarakat meningkat	Prosen	20	20	100%	
	2.1.3.3. Perencanaan umum, survey, studi kelayakan dan evaluasi pengendalian	Masukan : Dana Keluaran : UDKP Survey usulan pembangunan Rakorbang Usulan pelaksanaan pembangunan tahun 2004 Manfaat : Kesesuaian pembangunan dengan kebutuhan masyarakat Dampak : Derajat kehidupan masyarakat meningkat	Rupiah Paket kegiatan Paket kegiatan Kegiatan Paket Prosen Prosen	175,000,000.00 3 2 3 1 70 20	175,000,000.00 3 2 3 1 70 20	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	
2.2.1 Penyempurnaan dan pengembangan statistik	2.2.1.1. Lamongan Dalam Angka dan Indeks Pembangunan Manusia	Masukan : Dana Keluaran : LDA IPM Tersedianya dokumen LDA dan IPM per kecamatan Manfaat : Pengambilan kebijakan perencanaan berdasarkan data perencanaan Dampak : Akurasi data	Rupiah Buku Buku Buku Prosen Prosen	70,000,000.00 100 162 262 80 90	70,000,000.00 100 162 262 80 90	100% 100% 100% 100% 100% 100%	
	2.2.1.2. PORB	Masukan : Dana Keluaran : PDRB Hasil : Tersedianya dokumen PDRB per kecamatan Manfaat : Pengambilan kebijakan perencanaan berdasarkan data perencanaan Dampak : Perencanaan sesuai dengan kondisi perekonomian Lokal, regional dan nasional	Rupiah Buku Buku Prosen Prosen	30,000,000.00 100 100 80 50	30,000,000.00 100 100 80 50	100% 100% 100% 100% 100%	
	2.2.1.3. Pengadaan Peta Dasar	Masukan : Dana Keluaran : Peta Administrasi Lamongan Hasil : Tersedianya Peta Administrasi Lamongan	Rupiah Buku Buku	15,000,000.00 100 100	15,000,000.00 100 100	100% 100% 100%	

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
		Manfaat : Pengambilan kebijakan perencanaan berdasarkan data perencanaan	Prosen	80	80	100%	
		Dampak : Perencanaan sesuai dengan data yang tersedia	Prosen	50	50	100%	
2.2.2 Inventarisasi dan evaluasi sumber-daya	2.2.2.1 Validasi Data Desa/ Kelurahan dan Keluarga Miskin di Kabupaten Lamongan	Masukan : Dana Keluaran : Pendataan ulang desa/ kelurahan dan rumah tangga miskin Hasil : Tersedianya data desa/ kelurahan dan rumah tangga miskin Manfaat : Pedoman perencanaan pengentasan kemiskinan Dampak : Tepat sasaran kegiatan pengentasan kemiskinan	Rupiah Kecamatan buku CD Prosen Prosen	150,000,000.00 27 10 10 80 80	150,000,000.00 27 10 10 80 80	100% 100% 100% 100% 100% 100%	
2.2.3 Pengembangan Sistem Informasi	2.2.3.1. SIM Jalan	Masukan : Dana Keluaran : - Laporan Pendahuluan - Dokumen SOP/Manual HW - Software aplikasi - Materi Pelatihan - Laporan Akhir - CVD SIM Jalan Hasil : Tersedianya informasi mengenai kondisi jalan kabupaten Manfaat : Dokumen pendukung perencanaan pembangunan jalan poros desa dan kabupaten Dampak : Kesesuaian perencanaan pembangunan jalan dengan SIM Jalan	Rupiah Buku Paket Paket Buku Buku Keping Paket Prosen Prosen	75,000,000.00 5 10 1 25 10 15 1 VCD 60 60	75,000,000.00 5 10 1 25 10 15 1 VCD 60 60	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	
	2.2.3.2 Lamongan Menyingsing Fajar Serie II	Masukan : Dana Keluaran : Informasi mengenai potensi dan pariwisata Kabupaten Lamongan Hasil : Tersedianya dokumen tentang potensi Kabupaten Lamongan	Rupiah VCD VCD	75,000,000.00 100 100	75,000,000.00 100 100	100% 100% 100%	

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
		Manfaat : Dokumen pendukung pembangunan Daerah	Prosen	20	20	100%	
		Dampak : Tersedianya sistem informasi yang aktual	Prosen	30	30	100%	
3.1.2. Pembinaan dan pengembangan kerja sama	3.1.2.1. TMMD	Masukan : Dana	Rupiah	150,000,000.00	150,000,000.00	100%	
		Keluaran : - Pemb Jalan Makadam	m	2.300 x 2,5 m	2.300 x 2,5 m	100%	
		- Rehab Jembatan	m'	6 x 2,7 m	6 x 2,7 m	100%	
		- Rehab Masjid	Buah	2	2	100%	
		- Penyuluhan Hukum, Pajak, Retribusi, perijinan dan	Paket	1	1	100%	
		- Bantuan bibit bawang, mangga dan pohon jati	Kg	9000	9000	100%	
		Hasil : - Tersedianya sarana jalan, jembatan dan masjid yang	Prosen	70	70	100%	
		- Pemahaman masyarakat tentang hukum, pajak, retribusi, perijinan dan Simduk	Prosen	60	60	100%	
		Manfaat : - Terbukanya akses ekonomi masyarakat desa	desa	1	1	100%	
		- Meningkatnya kesadaran masyarakat atas hukum, pajak, retribusi, perijinan dan SIMDUK	Prosen	60	50	100%	
		Dampak : Kesejahteraan masyarakat meningkat	Prosen	20	20	100%	
	3.1.2.2. Program Pengembangan Kecamatan	Masukan : Dana	Rupiah	60,000,000.00	60,000,000.00	100%	
		Keluaran : - Dokumen laporan kegiatan	Desa	35	35	100%	
		Hasil : - Kelancaran pelaksanaan kegiatan					
		- Sosialisasi RAB	kali	1	1	100%	
		- Tepat waktu	Prosen	100	100	100%	
		- Tepat Sasaran	Prosen	100	100	100%	
		Manfaat : Pengentasan kemiskinan di perkotaan	Prosen	20	20	100%	
		Dampak : Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Prosen	20	20	100%	

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan	
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi			
3.1.2.3. Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan	Masukan	: Dana	Rupiah	60,000,000.00	60,000,000.00	100%		
	Keluaran	- Dokumen laporan kegiatan	Desa	35	35	100%		
	Hasil	- Kelancaran pelaksanaan kegiatan	kali	1	1	100%		
		- Sosialisasi RAB	Prosen	100	100	100%		
		- Tepat waktu	Prosen	100	100	100%		
	Manfaat	- Tepat Sasaran	Prosen	20	20	100%		
		: Pengentasan kemiskinan di perkotaan	Prosen	20	20	100%		
	Dampak	: Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Prosen	20	20	100%		
	3.1.2.4. Program Kerjasama dengan UNICEF	Masukan	: Dana	Rupiah	210,000,000.00	210,000,000.00	100%	
		Keluaran	- PITA Kesehatan :	unit	50	50	100%	
- alat bantu timbang			unit usaha	27	27	100%		
- Bantuan garam beryodium			Sekolah	16	16	100%		
Hasil		- Penerapan konsep MBS	anak	750	750	100%		
		- Sosialisasi akte kelahiran dan santunan anak tak mampu	kecamatan	27	27	100%		
		- Sosialisasi perlindungan anak	unit	50	50	100%		
Manfaat		- Tersedianya alat bantu timbang dan penyediaan awal stok awal untuk modal garam beryodium	unit usaha	27	27	100%		
		- Meningkatnya pengetahuan Konsep MBS	kasek dan guru SD/MI	16	16	100%		
		- Diketahuinya prosedur permohonan akte kelahiran	anak	750	750	100%		
Dampak		- Diketahuinya hak perlindungan anak	kecamatan	27	27	100%		
		: Kesejahteraan ibu dan anak	Prosen	60	60	100%		
		: Peningkatan kualitas SDM d'ni	Prosen	20	20	100%		
3.1.2.5. Integrasi GERDU TASKIN	Masukan	: Dana	Rupiah	801,000,000.00	801,000,000.00	100%		
	Keluaran	- Pemberdayaan lingkungan	Desa	23	23	100%		
		- Pemberdayaan manusia	Desa	10	10	100%		
		- Pemberdayaan usaha	Desa	10	10	100%		

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan	
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi			
		Hasil	- Pembedayaan lingkungan	Desa	23	23	100%	
			- Pembedayaan manusia	Desa	10	10	100%	
			- Pembedayaan usaha	Desa	10	10	100%	
		Manfaat	Membantu percepatan pengentasan kemiskinan	prosen	20	20	100%	
		Dampak	Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat	prosen	40	40	100%	
	3.1.2.6. Program P2TPD	Masukan	- Dana	Rupiah	50,000,000.00	50,000,000.00	100%	
		Keluaran	- Tersusunnya hasil assesmen analisis kemiskinan partisipatif	Desa	6	6	100%	
		Hasil	- Pembentukan Tim Pokja	Tim Pokja	1	1	100%	
			- Meningkatnya kelancaran pelaksanaan desentralisasi dan tonomi daerah	prosen	50	50	100%	
		Manfaat	Hasil assesmen AKP sebagai dokumen untuk penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan	prosen	60	60	100%	
		Dampak	Meningkatnya tata pemerintahan yang good governance dalam pelaksanaan program pembangunan	prosen	50	50	100%	
	3.1.2.7. Pendukung Pelaksanaan Program PKPS-BBM	Masukan	- Dana	Rupiah instansi	60,000,000.00	60,000,000.00	100%	
		Keluaran	- Kordinasi pelaksanaan program		11	11	100%	
			- Sosialisasi Program PKPS-BBM	Desa	465	465	100%	
			- Pemantauan	Kecamatan	27	27	100%	
			- Evaluasi	Kecamatan	27	27	100%	
		Hasil	- Penyelarasan pelaksanaan program	Prosen	90	90	100%	
			- Pemahaman pelaksanaan program	Prosen	75	75	100%	
			- Pemantauan perkembangan pelaksanaan program	Prosen	80	80	100%	
			- Laporan hasil kegiatan	Prosen	80	80	100%	

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Keterangan	
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi			
		Manfaat	- Mendukung kelancaran pelaksanaan program	Prosen	90	90	100%	
		Dampak	- Meningkatkan kualitas pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat	Prosen	90	90	100%	
	3.1.2.6. P2MPD	Masukan	- Dana	Rupiah	2,719,480,000.00	2,719,480,000.00	100%	
		Keluaran	- Pekerjaan Type A	Desa	54	54	100%	
			- Pekerjaan Type B	Desa	14	14	100%	
		Hasil	- Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dengan sistem pemberdayaan	Desa	54	54	100%	
			- Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dengan sistem kontraktual	Desa	14	14	100%	
		Manfaat	- Desentralisasi pemerintahan	prosen	70	70	100%	
			- Pemberdayaan masyarakat	prosen	70	70	100%	
			- Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana	prosen	70	70	100%	
		Dampak	- Membantu percepatan pengentasan kemiskinan	prosen	60	60	100%	

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Tahun 2003

INSTANSI

: BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN

Form : PPS

SASARAN	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan
1. Terwujudnya data dan perencanaan detail pembangunan daerah.	1. Tersusunnya / tersedianya dokumen/data - data yang digunakan bagi perencanaan pembangunan :				
	1 RUTRK/RDTRK	3 kec	3 kec	100%	
	2 Masterplan Pengelolaan SDA dan Jaringan Irigasi	1 unit	1 unit	100%	
	3 Masterplan Pengembangan komoditi pertanian	1 unit	1 unit	100%	
	4 Pemetaan wilayah pesisir dan laut	2 kec	2 kec	100%	
	5 SIM Jalan	1 unit	1 unit	100%	
	6 Pembangunan Kota Mandiri	1 unit	unit	0%	
	7 AKU dan Strategi Prioritas APBD	2 unit	2 unit	100%	
	8 Perencanaan umum, survey, studi kelayakan dan evaluasi pengendalian	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	
	9 LPJ Bupati	3 dokumen	3 dokumen	100%	
	10 Lamongan Dalam Angka dan IPM	2 unit	2 unit	100%	
	11 PDRB	100 eks	100 eks	100%	
	12 Pengadaan Peta Dasar	100 lembar	100 lembar	100%	
	13 Validasi data desa / kelurahan dan keluarga miskin di Kab. Lamongan	50 buku	50 buku	100%	
	14 Lamongan Menyingsing Fajar Serie II	100 keping	100 keping	100%	
15 Penelitian Pondok Pesantren dim pemberdayaan masyarakat	10 buku	10 buku	100%		

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KABUPATEN LAMONGAN

